

PENDAHULUAN

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik akut yang disebabkan oleh *Salmonella typhi* atau *paratyphi*. Nama lain penyakit ini adalah *enteric fever*, tifus, dan paratifus abdominalis.¹ Penularan terjadi melalui makanan atau air yang terkontaminasi *S.typhi* pada feses atau urin dari penderita demam tifoid atau karier.²

Menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2018, prevalensi demam tifoid diperkirakan sebesar 11-20 juta orang sakit karena tifoid dan antara 128.000 dan 161.000 orang meninggal setiap tahunnya.³

Di Indonesia penyakit demam tifoid menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk dengan kematian antara 0,6-5%.⁴ Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2012 demam tifoid pada pasien rawat inap menempati urutan pertama dengan jumlah kasus mencapai 40.760.⁵ Dan berdasarkan data 10 besar penyakit rawat inap di puskesmas tarogong demam tifoid menempati urutan ketiga dengan jumlah populasi sebanyak 237 pasien.

Penggunaan antibiotik ditujukan untuk mengobati penyakit-penyakit infeksi termasuk penyakit demam tifoid. Frekuensi pemakaian antibiotik yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan ketentuan yang sesuai atau tidak rasional dapat menimbulkan dampak yang merugikan seperti kekebalan antimikroba (resistensi) sehingga akan menimbulkan kegagalan terapi dan berbagai masalah seperti ketidaksembuhan penyakit, meningkatkan resiko efek samping obat.⁶

Suatu aspek penting dari pelayanan farmasi adalah memaksimalkan penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, dalam penggunaan obat yang tepat dan rasional perlu dilakukan berbagai kegiatan yang menjamin mutu yang terstruktur dan dilaksanakan secara berkesinambungan yang dinamakan Evaluasi Penggunaan Obat (EPO). Kegiatan EPO merupakan salah satu tindakan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Hal ini tercantum dalam Permenkes nomor 30 tahun 2014, mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.^{7,8}

Dalam Permenkes nomor 28 tahun 2014, disebutkan bahwa Puskesmas merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). FKTP merupakan fasilitas kesehatan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, pelayanan obat dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini menjadikan Puskesmas sebagai lini terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sehingga ketidaktepatan penggunaan obat pada tingkat Puskesmas dapat meningkatkan prevalensi masalah terkait obat di Indonesia.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penggunaan obat antibiotik pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap Puskesmas Tarogong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan obat antibiotik pada pasien demam tifoid di instalasi rawat inap Puskesmas Tarogong meliputi ketepatan indikasi, ketepatan obat, ketepatan dosis, ketepatan lama penggunaan obat, dan interaksi obat.

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas mengenai evaluasi penggunaan obat antibiotik pada pasien demam tifoid sehingga dapat berguna dalam pelayanan kesehatan yang lebih baik dan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

